

PANDANGAN KEPALA SEKOLAH MENGENAI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH DASAR DIY

Dinar Westri Andini¹, Ayu Rahayu², C. Asri Budiningsih³, Mumpuniarti⁴

Pendidikan Guru Sekolah Dasar^{1,2}, Teknologi Pendidikan³, Pendidikan Luar Biasa⁴

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta^{1,2}, Universitas Negeri Yogyakarta^{3,4}

Email: dinar@ustjogja.ac.id

Abstract: The proper view towards the inclusive education is very influential towards the success of the inclusive education implementation, starting from the policies applied, routines that will bring up a cultural acceptance of students' diversity and the implementation of classroom learning. The principal becomes the agent of change and as the main key in the development, the initiator of innovation and the decision maker on the implementation of inclusive education until they reach the success of the implementation practices in school. The purpose of this study is to explain the principals' view of the inclusive education in Yogyakarta Elementary School. Questionnaires were distributed to 25 principals in elementary schools in five districts in Yogyakarta Special Region. The results showed that 20 out of 25 school principals in SD DIY have a narrow view of inclusive education, which is still limited to the acceptance of children with special needs, but the majority of principals agree and are open to accept the students with the special needs to be able to study in regular school and study together with other students in the regular classroom.

Keywords: school principal's view, inclusive education.

PENDAHULUAN

Inklusi berasal dari bahasa Inggris yaitu "inclusion", yang artinya menyatukan, mengajak masuk atau mengikutsertakan (Sugiarmin, 2012). Lawan katanya adalah eksklusif, yang berasal dari kata "exclusion", yang artinya mengeluarkan atau memisahkan. Pengertian inklusi digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka; mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya termasuk anak berkebutuhan khusus untuk bergabung di lingkungan sosial yang sama.

Inklusif merupakan suatu gerakan dalam kesamaan hak sehingga akan mewujudkan masyarakat yang mampu menerima perbedaan dan hidup saling berdampingan satu sama lainnya. Mewujudkan masyarakat inklusif maka diawali pada ranah sekolah yang merupakan cermin dari miniatur masyarakat yang mewakili keberagaman yang ada dalam lingkungan masyarakat sebenarnya, sehingga masing-masing individu akan terbiasa dengan keberagaman dan memunculkan sikap kepedulian, kerjasama serta saling

menghargai. Hal ini menjadi sangat penting untuk terus dipromosikan sehingga tumbuh penerimaan keberagaman dalam masyarakat yang luas (Bailey & Plessis, 2006).

Inklusif sangat bermanfaat dalam menumbuhkan (a) kesadaran dan toleransi dari perbedaan, (b) meningkatkan empati dan welas asih bagi semua orang, (c) belajar saling membantu orang lain, dan (d) menemukan serta belajar keterampilan khusus dan unik (misalnya, bahasa isyarat, penggunaan teknologi bantu) (Downing & Peckham-hardin, 2007). Inklusif menandakan sikap hormat akan keberagaman dan keunikan dari masing-masing individu dan menggambarkan ideologi yang terbuka untuk semua (Isosomppi & Leivo, 2015). Terbuka dalam konsep lingkungan inklusif, berarti semua orang yang tinggal, berada dan beraktivitas dalam lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat merasa aman dan nyaman mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya. Mewujudkan dan mensukseskan hal tersebut sangat diperlukan kerjasama dari berbagai pihak.

Terdapat berbagai faktor yang sangat berperan dalam mensukseskan pelaksanaan pendidikan inklusif. Salah satu faktor penting adalah sikap kepala sekolah dalam memahami

makna pendidikan inklusif dan pandangan anak berkebutuhan khusus yang bergabung di sekolah reguler. Kepala sekolah merupakan “*the agen of change*” atau agen perubahan yang akan menjadi penghubung pengembangan sekolah menuju inklusif, inisiator perubahan dan pengambil kebijakan serta manajerial yang akan mengatur keberlangsungan pelaksanaan di lapangan (Cohen, 2015).

Kepala sekolah juga berperan penting mengembangkan iklim positif dan membina sekolah dalam penerimaan anak berkebutuhan khusus di ruang kelas reguler (Ball & Green, 2014; DuFour & Mattos, 2013 dalam (Chandler, 2015)). Sangat penting bahwa kepala sekolah mengidentifikasi dan mensyaratkan standar yang mencerminkan keyakinan bahwa semua anak dapat belajar dan bahwa semua anak memiliki hak fundamental untuk dididik dengan teman-teman mereka di lingkungan yang nyata (Fullan, 2003; Muijs et al., 2010 dalam (Chandler, 2015)). Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa sikap dan pandangan positif kepala sekolah dalam memaknai pendidikan inklusif sangat berpengaruh terhadap tindakan kepala sekolah dalam menerapkan prinsip dan praktik inklusif (Bailey & Plessis, 2006).

Mengingat Daerah Istimewa Yogyakarta telah mendeklarasikan sebagai kota inklusif, serta memiliki komitmen dalam hal pendidikan inklusif yang terbukti dari penghargaan *Inclusive Award* dan berdasarkan dari Peraturan Gubernur DIY No. 21 tahun 2013, pada pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus, artinya bahwa semua sekolah di DI Yogyakarta tidak boleh menolak anak dan harus menerima siapa saja yang akan mendaftar di sekolah tersebut (Daerah & Yogyakarta, 2013), oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui pandangan kepala sekolah mengenai pendidikan inklusif dan anak berkebutuhan khusus yang bergabung di sekolah reguler, sehingga hal tersebut akan menjadi acuan dalam langkah-langkah pengembangan pendidikan inklusif di DI Yogyakarta.

METODE

Metode penelitian adalah deskripsi dengan melakukan survei dan menyebarkan kuesioner. Kuesioner dikembangkan dan disusun berdasarkan komponen perspektif kepala sekolah dan anak berkebutuhan khusus bergabung di sekolah reguler. Komponen-komponen ini terdiri dari pemahaman kepala sekolah tentang konsep inklusi, persetujuan kepala sekolah terhadap kehadiran anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah umum. Untuk mengembangkan kuesioner, item pertanyaan bersama dengan dua jawaban alternatif untuk setiap item pertanyaan dibentuk berdasarkan setiap komponen. Responden diminta untuk memilih salah satu jawaban alternatif untuk setiap item pertanyaan yang dapat mewakili pendapat pribadi mereka.

Responden penelitian terdiri dari 25 kepala sekolah dasar inklusif di empat kabupaten dan satu kota dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekolah yang digunakan sebagai sampel penelitian dipilih dengan menggunakan teknik sampling acak berdasarkan wilayah dan kesempatan dalam menghadiri pelatihan pendidikan inklusif yang dipertimbangkan untuk dipilihnya sebagai populasi penelitian.

Sekolah-sekolah dipilih berdasarkan jarak dari pusat kota sampai jauh dari pusat kota. Selain itu, sekolah juga dipilih berdasarkan frekuensi (sering / jarang / tidak pernah) dari partisipasi mereka dalam pelatihan sekolah inklusif yang disediakan oleh Kantor Pendidikan dan lembaga lainnya (teknik pengumpulan data).

Teknik analisis data (penilaian, kategorisasi dan interpretasi). Data yang diperoleh dari kuesioner dianalisis secara deskriptif. Langkah-langkahnya sebagai berikut: (1) tabulasi semua jawaban dari setiap item pertanyaan mengenai komponen tertentu, (2) menghitung skor total masing-masing komponen, (3) menghitung persentase jawaban responden dari setiap komponen dan (4) menafsirkan data berdasarkan persentase yang diperoleh. Data yang ditafsirkan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pernyataan positif (jika persentase berada di kisaran 50 hingga 100 persen) dan pernyataan negatif (jika persentase berada di kisaran 0 hingga 50

persen). Untuk melihat perbandingan data masing-masing kabupaten/kota, disajikan ke dalam sebuah tabel yang mencakup semua komponen pandangan kepala sekolah tentang pendidikan inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian akan disajikan dalam tabel berdasarkan dari pandangan kepala sekolah mengenai pendidikan inklusif dan juga anak berkebutuhan khusus yang bergabung di kelas umum.

Tabel 1. Pandangan Kepala Sekolah Dasar DIY tentang pendidikan inklusif

Kabupaten/Kota	Pemahaman inklusif	
	Sempit	Luas
Kota Yogyakarta	60%	40%
Bantul	100%	0%
Sleman	80%	20%
Kulon Progo	60%	40%
Gunung Kidul	80%	20%

Berdasarkan dari tabel 1 mengenai pandangan kepala sekolah dasar DIY mengenai pendidikan inklusif. sebagian besar kepala sekolah di D.I. Yogyakarta memiliki pemahaman sempit mengenai pendidikan inklusif, masih dipahami bahwa pendidikan inklusif hanya menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Dari kelima daerah yang memiliki persentase tertinggi yaitu Bantul, Sleman dan Gunung Kidul. Hal tersebut menggambarkan bahwa pendidikan inklusif masih dipahami hanya penerimaan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Menurut Foreman (2005) bahwa inklusif adalah semangat keterbukaan dan menyambut akan keberagaman siswa dari berbagai latar belakang baik kemampuan, budaya, ras, suku, etnik dan latar belakang sosial, sehingga sekolah harus menyediakan dan membentuk lingkungan yang bisa menerima semua anak sebagai bagian dari masyarakat sekolah.

Pemahaman yang sesuai ini akan membentuk pemikiran bagaimana cara sekolah menyediakan dan memenuhi kebutuhan siswa. Kepala sekolah memiliki peran penting dalam pelaksanaan ini, mulai dari merencanakan dan menentukan tindakan apa saja yang akan sekolah lakukan dalam memunculkan partisipasi seluruh warga sekolah, penentuan

kapasitas sekolah dalam arti peningkatan kualitas guru dan staff dalam menerima keberagaman siswa, serta pengembangan fasilitas sekolah yang aksesibel untuk semua.

Tabel 2. Pandangan Kepala Sekolah Dasar DIY tentang ABK bergabung di kelas umum

Kabupaten/Kota	ABK di Kelas Umum	
	Setuju	Tidak Setuju
Kota Yogyakarta	100%	0%
Bantul	80%	20%
Sleman	80%	20%
Kulon Progo	100%	0%
Gunung Kidul	60%	40%

Tabel 2 tersebut menggambar bahwa seluruh daerah kabupaten dan kota memiliki persentase skor tinggi dengan menyatakan setuju bahwa anak berkebutuhan khusus bergabung di sekolah umum. Kepala sekolah setuju apabila ABK bersekolah di sekolah reguler. Para kepala sekolah menganggap bahwa semua siswa berhak mendapat pengajaran dengan tujuan agar memberi kesempatan bagi anak (khusus dan umum) untuk saling bersosialisasi dan menghargai setiap kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pandangan positif ini sangat mendukung penempatan anak-anak di lingkungan nyata mereka dan kepala sekolah memiliki kewenangan dalam menempatkan anak berkebutuhan khusus di ruang kelas reguler (Sugiarmin, 2012). Selain itu meyakini bahwa semua anak bisa belajar dan masing-masing memiliki potensi untuk berkembang, sehingga diperlukan berbagai strategi dan kemudian menggunakan banyak model mengajar serta penataan instruksional untuk memastikan bahwa semua siswa dapat meraih prestasinya (Arends, 2008). Pandangan yang positif akan penerimaan anak berkebutuhan khusus ini diharapkan bahwa anak tidak lagi diberi stigma atau labeling atas keterbatasannya, namun dilihat dari karakteritik dan meyakini bahwa masing-masing anak adalah unik.

PENUTUP

Pandangan dan pemahaman kepala sekolah yang benar mengenai pendidikan inklusif dan penerimaan anak berkebutuhan

husus di sekolah umum menjadi faktor penting sebagai salah satu kunci kesuksesan pendidikan inklusif. Hal tersebut dikarenakan kepala sekolah sebagai aktor utama dalam mengembangkan pendidikan inklusif di sekolah yang ia pimpin, melakukan inovasi-inovasi dalam pengembangan sekolah, pengambil kebijakan yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif serta orang yang akan menjadi model, mengatur dan merencanakan langkah-langkah nyata di sekolah. Kebijakan pemerintah D.I. Yogyakarta mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif di seluruh sekolah menjadi tantangan bagi seluruh komponen internal sekolah, khususnya kepala sekolah. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemahaman kepala sekolah mengenai makna pendidikan inklusif masih pada pemahaman sempit. Hal ini menjadi tugas bersama dan khususnya bagi pemerintah D.I Yogyakarta untuk kembali meningkatkan dan memberikan arahan yang benar mengenai makna pendidikan inklusif yang sebenarnya, bahwa pendidikan inklusif merupakan sebuah paradigma sikap keterbukaan untuk menerima semua anak tanpa memandang latar belakang mereka dan harus mewujudkan lingkungan yang ramah dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik dari masing-masing anak. Terlepas dari pemahaman sempit kepala sekolah dasar di DIY, pandangan mereka mengenai anak berkebutuhan khusus yang bergabung di sekolah umum sangat terbuka. Kepala sekolah setuju bahwa anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama di sekolah umum, mereka memiliki pendapat bahwa anak-anak juga harus belajar untuk menghargai ciptakan Tuhan dan tidak membeda-bedakannya. Harapannya anak akan terhindar dari stigmatis, labeling dan anak akan dilihat menjadi individu yang utuh, unik serta memiliki karakteritik masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Arends, R.I. 2007. *Learning To Teach Belajar Untuk Mengajar*. New York: McGraw Hill Companies.
- Bailey, J. & Plessis, D. 2006. Understanding principals' attitudes towards inclusive schooling. *Journal of Educational Administration*, 35(5), 428–438. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1108/09578239710184574>
- Chandler, T.L. 2015. School Principal Attitudes Toward the Inclusion of Students with Disabilities.
- Cohen, E. 2015. Principal Leadership Styles and Teacher and Principal Attitudes , Concerns and Competencies regarding Inclusion. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 186(2002), 758–764. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.105>
- Daerah, G., & Yogyakarta, I. 2013. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/21464>
- Downing, J.E. & Peckham-hardin, K.D. 2007. Inclusive Education : What Makes It a Good Education for Students With Moderate to Severe Disabilities ?, 32(1), 16–30.
- International Symposium Inclusion and the Removal Barriers Learning, Participation and Development*. 2006. (http://www.idpeurope.org/symposium/symposium_recommendations) (28 Februari 2016).
- Isosomppi, L. & Leivo, M. 2015. Becoming an Inclusive Teacher at the Interface of School and Teacher Education. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 171, 686–694. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.178>
- Moleong, L.J 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiarmin, M. (Ed). 2012. Sekolah Inklusif: Konsep dan Penerapan Pembelajaran. Bandung: Nuansa.